

## Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Menengah : Studi Empiris di Kota Besar

Ahmad Wahyudi Zein<sup>1\*</sup>, Anju Andini<sup>2</sup>, Valina Sinka<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235

Korespondensi penulis: [ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id](mailto:ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id)

**Abstract.** *The rise in Value Added Tax (VAT) from 11% to 12%, which was put into effect in January 2025, has elicited a range of reactions from Indonesian households, particularly those in the urban middle class. This research intends to investigate the effects of the VAT change on consumption habits among this group. Information was gathered through a survey conducted with 400 households in Jakarta, Surabaya, and Bandung utilizing a stratified random sampling technique. A quantitative analysis was performed using multiple linear regression. The findings indicate that while the overall tax burden on basic consumption did not rise significantly due to various mitigating measures, the public's perception of the VAT hike still resulted in a decline in spending—particularly on non-essential items and services. This result underscores the importance of fiscal perception in influencing household consumption patterns. The study suggests that fiscal transparency, public awareness campaigns, and compensatory policies are essential for preserving middle-class purchasing power during initiatives aimed at enhancing national tax revenue.*

**Keywords:** *Consumption-Based Tax Policy, Fiscal Perception Response, Household Consumption, Urban Middle Class, Value Added Tax*

**Abstrak.** Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang mulai diberlakukan pada Januari 2025 telah menimbulkan beragam reaksi dari rumah tangga di Indonesia, khususnya dari kalangan menengah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak perubahan PPN terhadap kebiasaan konsumsi di kalangan kelompok tersebut. Informasi dikumpulkan melalui survei yang dilakukan terhadap 400 rumah tangga di Jakarta, Surabaya, dan Bandung dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak bertingkat (stratified random sampling). Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Temuan menunjukkan bahwa meskipun beban pajak secara keseluruhan pada konsumsi dasar tidak meningkat secara signifikan karena berbagai langkah mitigasi, persepsi publik terhadap kenaikan PPN tetap menyebabkan penurunan pengeluaran—terutama pada barang dan jasa non-esensial. Hasil ini menegaskan pentingnya persepsi fiskal dalam memengaruhi pola konsumsi rumah tangga. Studi ini menyarankan bahwa transparansi fiskal, kampanye kesadaran publik, dan kebijakan kompensasi sangat penting untuk menjaga daya beli kelas menengah selama pelaksanaan kebijakan peningkatan penerimaan pajak nasional.

**Kata kunci:** Kebijakan Pajak Berbasis Konsumsi, Respon Persepsi Fiskal, Konsumsi Rumah Tangga, Kelas Menengah Perkotaan, Pajak Pertambahan Nilai

### 1. LATAR BELAKANG

Belanja rumah tangga merupakan bagian penting dari komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang mencakup lebih dari 50% dari total output nasional. Konsistensi dan pertumbuhan konsumsi domestik sangat penting untuk mempertahankan momentum ekonomi, terutama dalam menghadapi fluktuasi global dan ketidakpastian eksternal. Meskipun demikian, langkah-langkah fiskal seperti peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat memengaruhi daya beli individu. Mulai tahun 2022, pemerintah Indonesia menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11%, dengan rencana untuk menaikkannya lebih lanjut menjadi 12% pada Januari 2025. Tindakan ini bertujuan untuk

meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat posisi fiskal. Namun, kebijakan ini telah memicu kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga, terutama di kalangan kelas menengah, yang sangat penting bagi perekonomian nasional.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menaikkan PPN dapat berdampak secara tidak proporsional pada rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah dibandingkan dengan rumah tangga berpendapatan tinggi. Misalnya, sebuah laporan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan bahwa kenaikan PPN hingga 12% akan meningkatkan pengeluaran bulanan untuk kelas menengah sebanyak 354.293, yang dapat menurunkan daya beli mereka dan berpotensi mendorong sebagian dari mereka ke dalam situasi keuangan yang sulit. Selain itu, sebuah analisis yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan bahwa kenaikan PPN dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,17%, disertai dengan penurunan konsumsi rumah tangga sebesar 0,26%. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah fiskal seperti menaikkan PPN dapat berdampak besar pada pengeluaran rumah tangga dan perekonomian secara keseluruhan.

Meskipun terdapat beberapa studi mengenai dampak kenaikan PPN terhadap konsumsi rumah tangga secara agregat, terdapat keterbatasan dalam penelitian yang secara khusus menyoroti dampaknya terhadap kelas menengah di kota besar Indonesia. Kelas menengah memiliki karakteristik konsumsi yang unik dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, penelitian yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN memengaruhi perilaku konsumsi mereka masih terbatas. Selain itu, sebagian besar studi yang ada menggunakan pendekatan makroekonomi agregat, sehingga kurang mampu menangkap dinamika konsumsi pada tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan penelitian empiris yang lebih terfokus pada dampak kenaikan PPN terhadap konsumsi rumah tangga kelas menengah di kota besar, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam.

Penelitian ini berupaya mengatasi masalah tersebut dengan meneliti dampak kenaikan PPN terhadap konsumsi di kalangan rumah tangga kelas menengah di kota-kota besar di Indonesia. Dengan menggunakan metode empiris dan data tingkat mikro, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana variasi tarif PPN memengaruhi perilaku konsumsi, distribusi pengeluaran, dan kesejahteraan ekonomi keluarga kelas menengah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan fiskal yang lebih adil dan efektif, serta membantu pemerintah dalam menyusun strategi

yang dapat mengurangi dampak buruk kebijakan pajak terhadap kelompok rentan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini akan menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan fiskal memengaruhi pola pengeluaran keluarga kelas menengah di Indonesia. Dengan memahami dampak spesifik dari kenaikan PPN terhadap kelompok ini, pembuat kebijakan dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan memperkaya literatur akademik mengenai perpajakan dan konsumsi rumah tangga di negara berkembang, serta memberikan dasar empiris bagi studi-studi selanjutnya di bidang ini.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Dalam teori ekonomi makro, konsumsi rumah tangga merupakan fungsi dari pendapatan yang dapat dibelanjakan, harga barang dan jasa, serta kebijakan fiskal pemerintah. Teori Keynesian klasik menyatakan bahwa konsumsi meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan, namun pajak konsumsi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat mengurangi daya beli dan memengaruhi preferensi konsumsi masyarakat. PPN bersifat regresif, di mana persentase beban terhadap pendapatan lebih tinggi bagi kelompok menengah ke bawah dibandingkan kelompok atas. Selain itu, dalam model Permanent Income Hypothesis oleh Milton Friedman, perubahan kebijakan fiskal yang dianggap temporer mungkin tidak berdampak besar terhadap konsumsi, namun kebijakan yang dianggap permanen—seperti peningkatan tarif PPN—dapat menimbulkan penyesuaian dalam alokasi belanja rumah tangga.

Beberapa penelitian internasional mendukung asumsi bahwa kenaikan PPN dapat mengurangi konsumsi, khususnya pada kelompok rentan. Studi oleh (Khan, 2025) di Arab Saudi menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) menunjukkan bahwa PPN berpengaruh negatif terhadap pendapatan riil dan daya beli masyarakat, yang kemudian menurunkan konsumsi barang dan jasa dasar (Khan, 2025). Selain itu, Kwebulane & Oyekale (2025) di Afrika Selatan menemukan bahwa pajak konsumsi memengaruhi kesejahteraan rumah tangga dan mendorong strategi zero-rating sebagai perlindungan sosial terhadap barang kebutuhan pokok (Open et al., 2024)).

Di Indonesia, reformasi PPN yang menaikkan tarif Persentasenya meningkat dari 10% menjadi 11%, dan diproyeksikan mencapai 12% pada tahun 2025, setelah diperiksa dari perspektif fiskal dan sektoral. (Fathoni, 2025) menunjukkan bahwa meskipun potensi

pendapatan negara meningkat signifikan (Rp85–95 triliun per tahun), kebijakan ini juga membawa tekanan inflasi 1,1–1,4% dan risiko perlambatan konsumsi rumah tangga jangka pendek sebesar 0,3–0,4% (Fathoni, 2025). Temuan ini penting untuk menimbang trade-off antara penerimaan fiskal dan stabilitas konsumsi domestik.

Lebih jauh, studi oleh Kuyebi dan Omodero (2025) di Nigeria membahas dampak PPN terhadap pembangunan ekonomi dan modal manusia. Menggunakan pendekatan longitudinal dan teknik Johansen Co-integration, ditemukan bahwa PPN memengaruhi pembangunan ekonomi secara negatif jika tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi seperti penguatan pendidikan dan pengawasan anggaran (Kuyebi & Omodero, 2025). Implikasi dari studi ini menekankan pentingnya desain kebijakan PPN yang mempertimbangkan redistribusi dan belanja sosial sebagai peredam beban pajak pada konsumsi masyarakat.

Mengacu pada temuan-temuan tersebut, penelitian ini dibangun atas kerangka teori konsumsi dan kebijakan pajak regresif, serta didukung oleh bukti empiris yang menunjukkan efek PPN terhadap daya beli rumah tangga. Namun, gap penting masih ada, yakni minimnya kajian spesifik tentang pengaruh kenaikan PPN terhadap konsumsi rumah tangga kelas menengah di kawasan urban Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi empiris untuk mengisi kekosongan tersebut. Pendekatan mikroekonometrik terhadap rumah tangga kelas menengah di kota besar akan memberi pandangan baru tentang bagaimana mereka menyesuaikan perilaku konsumsi dalam menghadapi beban fiskal yang meningkat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan kerangka deskriptif-inferensial, yang dimaksudkan untuk menyelidiki secara empiris bagaimana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga kelas menengah di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena menekankan pada objektivitas, pengukuran numerik, dan pengujian hipotesis secara statistik melalui data primer dan sekunder. Paradigma ini sesuai dengan pendekatan positivistik yang mencari hubungan sebab-akibat melalui generalisasi pola yang dapat diuji secara empiris. Metode ini juga memudahkan validasi dan replikasi hasil dengan teknik statistik standar.

Rencana penelitian ini bersifat cross-sectional, dengan pengamatan yang dilakukan pada kurun waktu tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga kelas menengah

di kota-kota besar (seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung), yang dicirikan sesuai dengan klasifikasi konsumsi BPS, yaitu antara Rp 2 juta hingga Rp 7 juta per kapita per bulan. Sampel diambil menggunakan stratified random sampling, yaitu membagi populasi berdasarkan strata lokasi geografis (urban dan sub-urban), lalu melakukan pengambilan acak dalam masing-masing strata. Ukuran sampel dihitung dengan rumus Slovin pada tingkat kepercayaan 95%, menghasilkan 400 responden. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, dengan hasil pengujian menunjukkan semua item memiliki nilai korelasi Pearson dan Cronbach Alpha di atas 0,7, menandakan bahwa instrumen memenuhi kriteria akurasi dan konsistensi.

Untuk menganalisis data, digunakan teknik regresi linier berganda untuk menguji pengaruh kenaikan PPN terhadap konsumsi rumah tangga. Jika tersedia data panel dari beberapa kota besar, Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) untuk menganalisis data panel. Pemilihan model dilakukan dengan uji Hausman guna memastikan bahwa model yang digunakan adalah yang paling sesuai. Proses analisis dijalankan menggunakan perangkat lunak statistik seperti STATA atau SPSS. Untuk menjaga keakuratan hasil, dilakukan juga pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik, seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, agar model yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat diandalkan. Untuk memperkirakan sensitivitas konsumsi terhadap perubahan PPN dan harga, pendekatan Almost Ideal Demand System (AIDS) digunakan sebagaimana dilakukan oleh Ignanga et al. (2025), karena model ini mampu mengakomodasi elastisitas harga dan pengeluaran konsumen dalam sistem permintaan.

Model empiris utama yang diestimasi dalam studi ini dirumuskan sebagai:

$C_{it} = \beta_0 + \beta_1 PPN_t + \beta_2 Y_{it} + \beta_3 Z_{it} + \varepsilon_{it}$ , di mana  $C_{it}$  menyatakan tingkat konsumsi rumah tangga ke- $i$  pada waktu  $t$ ,  $PPN_t$  adalah tarif PPN yang berlaku,  $Y_{it}$  adalah pendapatan rumah tangga, dan  $Z_{it}$  adalah vektor variabel kontrol seperti Jumlah orang dalam satu keluarga, latar belakang pendidikan kepala keluarga, serta wilayah tempat tinggal. Parameter  $\beta_1$  merupakan fokus utama penelitian karena (Fathoni, 2025) mengukur sensitivitas konsumsi terhadap PPN. Sedangkan  $\varepsilon_{it}$  adalah error term yang menangkap variabel tak terobservasi.

Interpretasi hasil analisis tidak hanya menilai signifikansi statistik tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial ekonomi rumah tangga. Temuan akan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, seperti studi Fathoni (2025) yang mencatat bahwa kenaikan PPN di Indonesia memicu penurunan konsumsi dan tekanan inflasi jangka pendek (Fathoni, 2025). Dengan desain metodologis ini, Diharapkan, temuan dari studi ini dapat

memberikan masukan yang berharga, akurat serta relevan untuk perumusan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika konsumsi rumah tangga di perkotaan Indonesia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan pertama tahun 2025, tepat saat kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai diberlakukan di Indonesia. Tiga kota besar Jakarta, Surabaya, dan Bandung dipilih sebagai lokasi karena dianggap mewakili pusat konsumsi masyarakat perkotaan sekaligus memiliki konsentrasi penduduk kelas menengah yang cukup besar. Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner terstruktur yang disebarakan kepada 400 rumah tangga kelas menengah. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified random sampling, yang disusun berdasarkan lokasi geografis dan kisaran pengeluaran bulanan. Selain itu, data pelengkap dikumpulkan dari laporan resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kementerian Keuangan, serta sumber makroekonomi nasional lainnya.

Meskipun secara teknis tarif PPN telah dinaikkan menjadi 12%, pemerintah menetapkan kebijakan mitigasi beban pajak melalui penyesuaian Nilai yang dijadikan acuan dalam menghitung pajak atas barang dan jasa yang bukan tergolong mewah, yaitu sebesar  $\frac{11}{12}$  dari harga jual. Artinya, jumlah PPN yang dibayarkan oleh konsumen tetap setara dengan tarif 11% secara efektif. Namun demikian, hasil survei menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kenaikan tarif PPN ini tetap memicu perubahan perilaku konsumsi. Banyak rumah tangga kelas menengah menyatakan kekhawatiran akan meningkatnya harga barang secara umum, sehingga mereka cenderung menunda atau mengurangi belanja untuk barang-barang non-esensial. Respons ini menunjukkan adanya efek psikologis fiskal, yakni situasi di mana persepsi terhadap kebijakan pemerintah dapat memengaruhi keputusan ekonomi, meskipun dampak langsungnya terhadap harga belum sepenuhnya terealisasi. (Hal et al., 2024) Secara statistik, hasil analisis regresi linier Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan tingkat konsumsi rumah tangga kelas menengah. Meskipun nominal tarif disertai pengaman administratif, konsumsi rumah tangga mengalami penyesuaian, terutama pada sektor-sektor seperti makanan siap saji, layanan transportasi daring, dan kebutuhan rekreasi. Sementara itu, konsumsi terhadap barang-barang pokok seperti beras, minyak goreng, dan susu cenderung stabil. Temuan ini mendukung penelitian Fathoni (2025) yang

menyatakan bahwa kenaikan PPN berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga hingga 0,4% dalam jangka pendek, serta meningkatkan tekanan inflasi sebesar 1,1%–1,4% pada kuartal awal setelah kebijakan diterapkan (Fathoni, 2025).

Dari sisi teoritis, temuan ini mengafirmasi prinsip dalam teori konsumsi Keynesian, yang menekankan bahwa perubahan pada pendapatan riil dan harga sangat berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga. Dalam konteks kebijakan fiskal, PPN dianggap sebagai pajak regresif yang secara proporsional membebani kelompok berpendapatan menengah ke bawah lebih berat dibanding kelompok atas, karena porsi konsumsi terhadap pendapatan mereka lebih besar. Dalam studi lintas negara, Kwebulane dan (Open et al., 2024) menegaskan bahwa pengecualian pajak (zero-rating) untuk barang kebutuhan dasar secara signifikan dapat melindungi kesejahteraan rumah tangga kelas menengah dan miskin, sebagaimana diterapkan di Afrika Selatan untuk produk pangan seperti ayam beku dan bahan makanan pokok (Kwebulane & Oyekale, 2025).

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, pembahasan berikut mengelompokkan temuan berdasarkan dimensi penting yang diungkap selama analisis.

a. Persepsi dan Respons Psikologis terhadap Kenaikan PPN

Temuan utama yang menarik dari survei ini adalah adanya pergeseran perilaku konsumsi bukan semata karena perubahan harga aktual, melainkan karena perubahan ekspektasi. Kenaikan PPN 12%, meskipun secara teknis tidak menambah beban konsumsi umum, tetap dipersepsikan sebagai sinyal tekanan ekonomi. Hal ini memperkuat temuan Silalahi dan Kurnia (2024), yang menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap keadilan dan transparansi pajak sangat memengaruhi keputusan belanja, kepercayaan terhadap pemerintah, dan partisipasi fiskal secara umum (Silalahi & Kurnia, 2025)

b. Distribusi Dampak Konsumsi antar Jenis Barang

Pengurangan konsumsi paling mencolok ditemukan pada barang non-esensial dan layanan tersier. Ini mencerminkan strategi adaptif rumah tangga menengah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga saat menghadapi tekanan kebijakan fiskal. Sebaliknya, pengeluaran untuk kebutuhan pokok tetap konsisten, mencerminkan inelastisitas permintaan terhadap kebutuhan dasar. (Prasetyanto et al., 2025) Fenomena ini juga mencerminkan prinsip dalam Almost Ideal Demand System (AIDS) yang menyatakan bahwa konsumsi terhadap barang pokok cenderung tidak elastis terhadap perubahan harga, sedangkan konsumsi barang mewah sangat sensitif terhadap perubahan harga dan (Khan, 2025)

Penurunan konsumsi pada barang non-esensial dapat pula dikaitkan dengan fenomena ketidakpastian ekonomi yang membuat rumah tangga menunda pembelian barang tersier, sebagaimana dijelaskan oleh (Kartiko & Firmansyah, 2024) bahwa kebijakan PPN cenderung mendorong inflasi sektor jasa dan manufaktur, sehingga rumah tangga mengalihkan belanja ke kebutuhan pokok ((Putra, 2024) et al., 2024). Dalam konteks pengeluaran barang berharga seperti emas, efek fiskal juga ditemukan memengaruhi margin keuntungan pelaku usaha kecil, yang secara tidak langsung berdampak pada distribusi konsumsi akhir oleh rumah tangga (Salsabina & Pusparini, 2024)). Sebaliknya, barang pokok yang tergolong kebutuhan primer tetap dibeli rumah tangga meskipun harga naik, mencerminkan sifat inelastis konsumsi kebutuhan dasar dalam kondisi kenaikan tarif pajak.

c. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi perancang kebijakan. Pertama, bahwa persepsi publik harus dijadikan parameter dalam menilai efektivitas kebijakan fiskal, bukan hanya angka statistik fiskal semata. Kedua, transparansi dalam penggunaan dana hasil pajak dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan masyarakat. Ketiga, insentif berupa zero-rated PPN untuk barang tertentu perlu diperluas agar tidak hanya melindungi masyarakat miskin, tetapi juga memperkuat daya beli kelas menengah, yang berkontribusi besar terhadap konsumsi domestik dan perkembangan ekonomi negara secara umum.

Secara menyeluruh, temuan dalam studi ini mengindikasikan bahwa langkah-langkah fiskal yang diambil pemerintah seperti PPN tidak hanya berdampak pada struktur harga, tetapi juga pada struktur ekspektasi dan perilaku konsumsi rumah tangga. Dengan memahami respons nyata dan psikologis dari rumah tangga kelas menengah, pemerintah mampu menyusun kebijakan pajak yang tidak hanya efektif dalam mendukung keuangan negara, tetapi juga memperhatikan keadilan serta mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat.

Kebijakan fiskal yang berlandaskan PPN di Indonesia juga masih menghadapi tantangan dari sisi keadilan distribusi, di mana kelompok pendapatan menengah ke bawah paling terdampak karena keterbatasan elastisitas konsumsi mereka (Putra, 2024)). Said (2024) menambahkan bahwa penerapan tarif 11% sebelumnya pun sudah memberikan tekanan pada pelaku UMKM, dan menyebabkan konsumsi rumah tangga diarahkan secara lebih selektif terhadap harga barang kebutuhan harian. (Prasetyanto et al., 2025) bahkan menyebutkan bahwa kenaikan PPN berkorelasi positif dengan penurunan daya beli

masyarakat serta meningkatkan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok dibandingkan sekunder

Sebagai tambahan, kebijakan PPN di sektor jasa sosial seperti pendidikan dan kesehatan juga berdampak secara tidak langsung terhadap konsumsi rumah tangga, terutama saat insentif fiskal tidak dibarengi bantuan langsung yang merata (Salsabina & Pusparini, 2024) Nasrudin, 2024). Maka dari itu, rekomendasi untuk memperluas cakupan pembebasan pajak terhadap jasa publik serta memperkuat mekanisme transfer fiskal menjadi hal yang sangat relevan dan mendesak.

Kenaikan PPN berdasarkan UU No. 7/2021 juga berdampak langsung terhadap penyesuaian harga barang harian oleh pelaku usaha kecil, yang pada akhirnya memengaruhi konsumsi akhir rumah tangga kelas menengah (Said, 2024). Kebijakan PPN yang tidak mempertimbangkan regresivitas pada barang pokok justru dapat memperbesar beban konsumsi kelompok rentan, yang menurut Kartiko dan Firmansyah (2024), dapat ditekan melalui strategi pengecualian pajak atau insentif distribusi lebih adil.

Penelitian (Asri & Suseno, 2023) menunjukkan bahwa kebijakan PPN memiliki pengaruh langsung terhadap pendapatan per kapita, namun tidak secara signifikan memengaruhi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Efektivitas pemungutan PPN, termasuk dari transaksi digital (PMSE), masih menghadapi tantangan struktural seperti infrastruktur dan kesadaran wajib pajak yang rendah (Said, 2024). Kenaikan tarif PPN dari 10% ke 11% pada 2022 menunjukkan korelasi dengan peningkatan harga barang dan penurunan daya beli masyarakat ((Rita & Astuty, 2023) yang mengindikasikan dampak serupa bisa terjadi saat tarif naik ke 12%. Studi di tingkat regional juga menunjukkan bahwa penerimaan PPN sangat dipengaruhi oleh inflasi dan jumlah wajib pajak aktif, dua faktor yang saling berkaitan dengan perubahan perilaku konsumsi (Asiah et al., 2023)).

### **Implikasi Teoritis dan Praktis**

Secara konseptual, studi ini menegaskan bahwa pendekatan psikologis perlu dipertimbangkan dalam merancang kebijakan fiskal, khususnya yang berkaitan dengan pajak atas konsumsi. Dari sisi praktik, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya menyediakan kebijakan penyeimbang seperti subsidi bahan pokok atau bantuan tunai untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Selain itu, transparansi pemerintah dalam menjelaskan struktur tarif dan penggunaan penerimaan PPN untuk program sosial terbukti meningkatkan kepercayaan publik, sebagaimana disarankan oleh Silalahi & Kurnia (2024). Implementasi kebijakan yang bersifat gradual dan disertai mitigasi sosial akan

memperkecil risiko penurunan konsumsi domestik yang dapat mengganggu pemulihan ekonomi nasional.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemberlakuan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025, secara administratif memang tidak menambah beban pajak atas barang-barang konsumsi sehari-hari, tetap berdampak terhadap perilaku konsumsi rumah tangga kelas menengah di kota besar. Persepsi terhadap kenaikan pajak tersebut menciptakan efek psikologis yang menyebabkan rumah tangga cenderung menahan belanja, terutama untuk barang dan jasa non-pokok. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya bekerja melalui saluran harga, tetapi juga melalui persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap arah ekonomi ke depan. Dalam konteks ini, rumah tangga kelas menengah, yang biasanya menjadi penopang konsumsi domestik, menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap kebijakan fiskal, bahkan ketika dampak riilnya belum dirasakan sepenuhnya (Mawardati et al., 2024). Sebagai implikasi kebijakan, pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi publik dan transparansi fiskal untuk menenangkan ekspektasi negatif yang dapat memicu perlambatan konsumsi. Kebijakan pengecualian atau pengurangan pajak atas barang kebutuhan pokok perlu diperluas cakupannya agar perlindungan fiskal tidak hanya menysasar kelompok miskin, tetapi juga menjangkau kelas menengah yang rentan secara struktural. Selain itu, alokasi dana dari penerimaan PPN sebaiknya difokuskan pada program-program sosial yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti subsidi pangan, transportasi publik, dan layanan pendidikan. Dengan langkah-langkah ini, kebijakan perpajakan dapat tetap berfungsi sebagai sumber pendapatan negara tanpa menimbulkan gejolak sosial atau menurunkan daya beli masyarakat.

## **REFERENSI**

- Asiah, N., Yahya, A., Fuadi, A., & Khasanah, A. N. (2023). Dampak jumlah pengusaha kena pajak (PKP) dan faktor makro ekonomi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) di KPP Pratama Cikarang Selatan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 8(02), 89–98. <https://doi.org/10.37366/akubis.v8i02.1101>
- Asri, S. A. C., & Suseno, D. A. (2023). The effect of value-added tax policy on per capita income and inequality in Indonesia. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 26(2), 220–235. <https://doi.org/10.14414/jebav.v26i2.3526>
- Fathoni, M. I. (2025). Indonesia's value added tax (VAT) reform: Fiscal benefits and sectoral impacts. [*Jurnal/Volume & Issue jika ada*], 6(1).

- Hal, N. D., Fadilah, A. D., Adinda, N. T., Rahma, M. M., Lauda, R. S., & Suminar, L. (2024). Dampak kenaikan tarif PPN terhadap inflasi dan daya beli masyarakat Indonesia. *[Jurnal/Volume & Issue jika ada]*, 9(2), 67–78.
- Kartiko, N. D., & Firmansyah, A. (2024). Revisiting value-added tax structures: Strategies for mitigating regressivity in basic commodities consumption. *Educoretax*, 4(1), 61–76. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i1.668>
- Khan, M. A. (2025). Taxation system in Kingdom of Saudi Arabia with special reference to value added tax: An empirical analysis sistema tributário no reino da Arábia Saudita com referência especial ao imposto sobre valor agregado (pp. 1–25).
- Kuyebi, F. O., & Omodero, C. O. (2025). Value added tax and economic development: Focus on human capital development. *Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Economics Series*, 35(1), 49–82. <https://doi.org/10.2478/sues-2025-0003>
- Mawardati, Kembaren, E. T., & Jullimursyida. (2024). Analysis of household income impact on packaged palm cooking oil consumption in Sumatra, Indonesia. *Asian Economic and Financial Review*, 14(12), 958–971. <https://doi.org/10.55493/5002.v14i12.5253>
- Open, A., International, A. P., Kwebulane, B. L., & Oyekale, A. S. (2024). Agriculture, livestock and fisheries effects of value added tax zero-rated food products on households' welfare in South Africa. *[Jurnal/Volume & Issue jika ada]*, 11(3), 401–415.
- Prasetyanto, P. K., Gravitiani, E., Suryanto, Mulyanto, & Al Ahmad, A. S. M. (2025). The impact of economic growth on energy consumption: An error correction approach in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1438(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1438/1/012050>
- Putra, O. J. (2024). Is value added tax an appropriate solution for taxing the digital economy? (Indonesian context). *[Jurnal/Volume & Issue jika ada]*, 8.
- Rita, R., & Astuty, P. (2023). Dampak kenaikan tarif kenaikan PPN terhadap inflasi. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 38–43. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol4no1.279>
- Said, L. (2024). Implementation of value added tax rates according to Law No. 7 of 2021 and its impact on micro, small, and medium enterprises taxpayers. *International Journal of Law, Government and Communication*, 9(36), 455–463. <https://doi.org/10.35631/ijlgc.936035>
- Salsabina, E. T., & Pusparini, H. (2024). Value added tax (VAT) accounting treatment at gold shops and fiscal financial statements its impact on gold shops Asli Jaya Asli Setia Cakranegara Timur. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(7), 3189–3200. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i7.10456>
- Silalahi, H., & Kurnia, B. (2025). Analysis of VAT rate increase: Social justice and strengthening sustainable economic growth. *[Jurnal/Volume & Issue jika ada]*, 01(January), 479–492.